



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

KECAMATAN MOJOAGUNG 2024 - 2026

JUNI 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN
JOMBANG**
Jl. Raya Sumobito No. 24A Mojoagung
Telp. (0321) 495002 JOMBANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufiq, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Mojoagung Renstra Kecamatan Mojoagung) Tahun 2024 - 2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Mojoagung (Renstra Kecamatan Mojoagung) merupakan acuan perencanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 guna pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah.

Mekanisme dan tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Mojoagung sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka diperlukan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 – 2026.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Namun dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut maka Renstra disusun untuk periode 3 (tiga) tahun yaitu periode tahun 2024 -2026. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Renstra Kecamatan Mojoagung diawali dengan proses evaluasi dan dilakukan penyerasian dengan perkembangan terkini kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi serta terbitnya ketentuan yang harus ditindaklanjuti daerah. Perubahan program, kegiatan, anggaran serta indikator menyesuaikan dengan kebijakan daerah.

Harapan kami semoga Renstra Kecamatan Mojoagung ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan perencanaan

pembangunan daerah serta mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Mojoagung, 27 Juni 2023

CAMAT MOJOAGUNG

MUCHTAR, S.IP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19720621 199803 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing - masing Perangkat Daerah.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Jombang yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2023 diamanatkan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 - 2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Namun dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut maka Renstra disusun untuk periode 3 (tiga) tahun yaitu periode tahun 2024 -2026. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat - perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mojoagung yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mojoagung selama tiga tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Kecamatan Mojoagung yang mendukung pencapaian Tujuan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mojoagung .

Tahap ini dilakukan dengan:

1. Rapat Koordinasi dalam pembahasan Renstra bersama seluruh pegawai pemerintah Kecamatan Mojoagung dalam Rapat Dinas dan Rapat Koordinasi terbatas para pejabat struktural Kecamatan Mojoagung.
2. melaksanakan orientasi mengenai renstra untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Mojoagung , menyusun tata kala sebagai panduan kerja, dan
3. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra.

Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Kecamatan Mojoagung. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan, analisis permasalahan, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja.

3. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Kecamatan Mojoagung.

Rancangan Renstra adalah rancangan awal Renstra Kecamatan Mojoagung yang dilakukan berdasarkan Surat Bupati Jombang Nomor : 050/8051/415.42/2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

4. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Kecamatan Mojoagung. Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Kecamatan Mojoagung menjadi rancangan akhir Renstra Kecamatan Mojoagung dengan berpedoman pada RPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rancangan akhir Renstra Kecamatan Mojoagung disusun dengan

sistematika:

- I. Pendahuluan;
 - II. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - III. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - IV. Tujuan dan sasaran;
 - V. Strategi dan arah kebijakan;
 - VI. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan;
 - VII. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
 - VIII. Penutup.
5. Rancangan akhir Renstra Kecamatan Mojoagung disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati Jombang melalui Kecamatan Mojoagung untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Selanjutnya Rancangan Awal RPJMD yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut akan disampaikan kepada semua perangkat daerah untuk digunakan sebagai rujukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Untuk kurun waktu 2024 – 2026 Bappeda Kabupaten Jombang tidak Menyusun RPJMD, namun Menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 (RPD).

Hubungan RPD dengan Renstra Perangkat Daerah adalah bahwa RPD menjadi rujukan atau pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Dikatakan bersifat indikatif adalah karena data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Renstra Perangkat Daerah disusun dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pengembangan Kecamatan Mojoagung diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan tujuan dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak di bidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berangkat dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya

terkandung formulasi tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Dalam rangka tertib perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, perlu disusun pedoman klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dengan demikian diharapkan dapat berkontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik pemerintah daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah mendasari adanya perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra 2024-2026.

Penyusunan Renstra 2024-2026 yang kedua didasari atas adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,

Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tertanggal 23 Juni 2023. Penyusunan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana maka Pemerintah Kecamatan Mojoagung mengembangkan tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Mojoagung dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian tujuan dan arah kebijakan Kabupaten Jombang sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Mojoagung dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 3 tahun (2024, 2025, dan 2026) maupun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang berlaku satu tahunan.

Renstra-SKPD atau Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan selama masa transisi kekosongan pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra-SKPD, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

Dalam membuat Renstra memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan. Hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya saling berkaitan. Baik dari Dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada ditataran daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra kecamatan adalah RPJD kabupaten jombang untuk memudahkan menuangkan dalam semua kepala bidang/seksi, maka diturunkanlah melalui Renstra Kecamatan Mojoagung.

Adapun Tata Cara Penyusunan Renstra PD Menurut

Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Keputusan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Keputusan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Keputusan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

- Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Keputusan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
14. Keputusan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur;
15. Keputusan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi

Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023.

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Daerah No 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D) ;
21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 59/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 59/D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 8/E);
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 10/E) ;
24. Surat Bupati Jombang Nomor 050/8051/415.42/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026

25. Peraturan Bupati Jombang No 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 10/E)

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud sebagai penjabaran secara operasional tahun 2024-2026 yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta penataan ruang yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang selama kurun waktu 2024 - 2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Mojoagung Tahun 2024 - 2026 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Kecamatan Mojoagung, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Mojoagung. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Mojoagung untuk kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar

- dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Mojoagung;
2. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Mojoagung dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, yang menguraikan :

- 1.1 Latar belakang.
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan.
- 1.3 Maksud dan tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II. Gambaran Pelayanan Kecamatan Mojoagung yang menguraikan :

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Mojoagung
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Mojoagung

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojoagung

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Mojoagung

3.1 Permasalahan Pelayanan PD

3.2 Isu-Isu Strategis

Bab IV. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Kabupaten Jombang

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan
Mojoagung

4.2 Cascading Kinerja Kecamatan Mojoagung

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI . Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta
Pendanaan

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII. Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MOJOAGUNG

Pada Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas pokok dan fungsi) kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki kecamatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra kecamatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas kecamatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan P-RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui P-Renstra kecamatan ini.

Kecamatan Mojoagung merupakan kecamatan dengan luas wilayah 4.850,204 Ha. Secara geografis Kecamatan Mojoagung berbatasan dengan:

Tabel 2.1
Batas Wilayah Kecamatan Mojoagung

Batas sebelah	Berbatasan dengan
Utara	Kecamatan Sumobito
Timur	Kec.Trowulan, Mojokerto
Selatan	Kec. Mojowarno
Barat	Kec. Peterongan

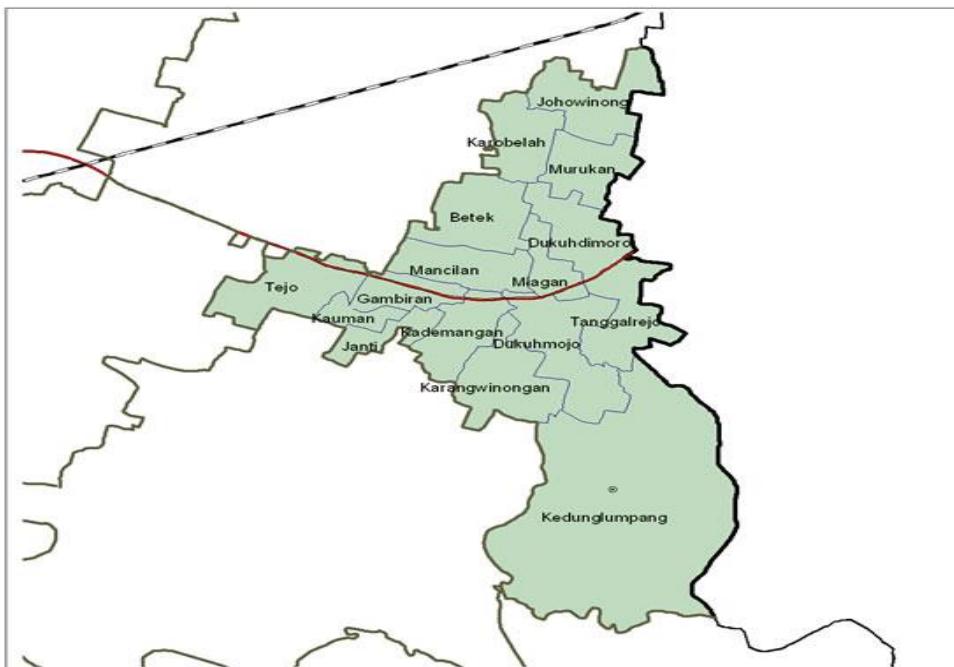
Kecamatan Mojoagung merupakan wilayah kecamatan yang memiliki 18 (delapan belas) desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2

Nama-nama Desa di Kecamatan Mojoagung

No.	Nama Desa	No.	Nama Desa
1.	Miagan	10.	Karangwinongan
2.	Mojotrisno	11.	Betek
3.	Mancilan	12.	Janti
4.	Kademangan	13.	Murukan
5.	Kauman	14.	Karobelah
6.	Tanggalrejo	15.	Johowinong
7.	Dukuhmojo	16.	Tejo
8.	Dukuhdimoro	17.	Kedunglumpang
9.	Gambiran	18.	Seketi

Secara lebih detail mengenai desa-desa yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Mojoagung dapat dilihat dalam peta Kecamatan Mojoagung sebagai berikut:



Gambar 1

Peta Kecamatan Mojoagung

Kecamatan Mojoagung lebih dominan sebagai wilayah industri baik industri kecil, menengah, maupun industri besar. Banyaknya industri ini dikarenakan akses di Kecamatan Mojoagung yang begitu mudah, baik akses Kabupaten/Kota, maupun akses antar Provinsi. Menjadi jalur persimpangan kendaraan antar Kabupaten/Kota maupun antar Provinsi menyebabkan Kecamatan Mojoagung menjadi tempat yang tepat untuk dijadikan sebagai kawasan industri.

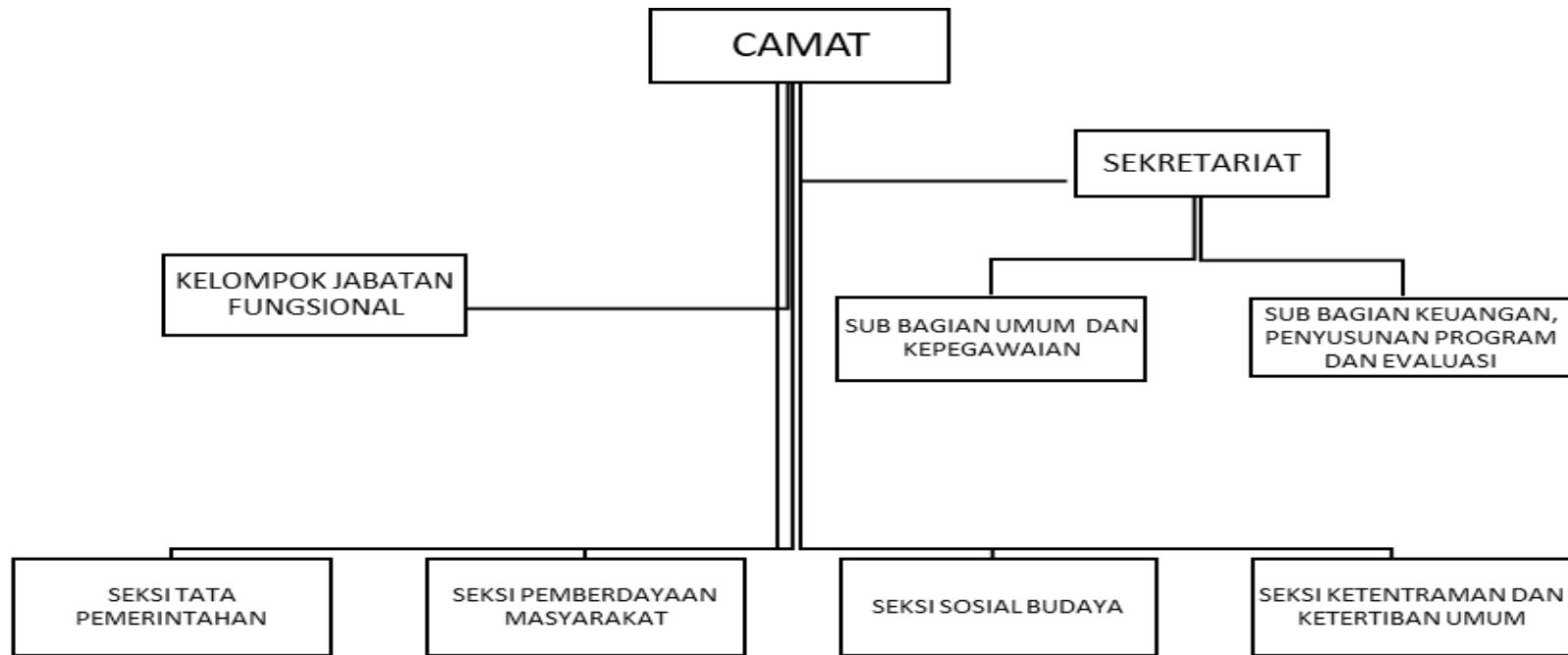
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang No 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka susunan Susunan organisasi Kecamatan di Kabupaten Jombang terdiri dari:

1. Camat ;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi ;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Sosial Budaya;
7. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Gambar 1
Struktur Organisasi Kecamatan Mojoagung



Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat ;

Tugas pokok Camat adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

- (1) Penyelenggaraan kewenangan wajib Kabupaten dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- (3) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- (4) Pengkordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- (5) Pengkordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- (6) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- (7) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- (8) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan

- desa dan kelurahan;
- (9) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Dearah yang ada di kecamatan; dan
- (10) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat, membawahi:

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Camat dalam melaksanakan, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendak di bidang ketatausahaan, administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunyai fungsi:
- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - Pengelolaan administrasi keuangan;
 - Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - Pengelolaan urusan rumah tangga;

- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- h. Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- j. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat, membawahi

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
 - 1) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
 - 2) Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
 - 3) Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa;
 - 4) Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
 - 5) Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan kecamatan;
 - 6) Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;

- 7) Mengkoordinasikan dan menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal;
- 8) Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
- 9) Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi;
- 10) Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas:

- 1) Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- 2) Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- 3) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- 4) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- 5) Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- 7) Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan

- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 10) Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:
 - 1) Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 2) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
 - 3) Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
 - 4) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
 - 5) Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 6) Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
 - 7) Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - 8) Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di kecamatan;
 - 9) Melaksanakan tugas pembantuan; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

11) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- 3) Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;
- 4) Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa /Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- 6) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan

- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 12) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:
 - 1) Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
 - 2) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana.
 - 3) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - 4) Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
 - 5) Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
 - 6) Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 8) Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;

- 9) Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
 - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 13) Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:
- 1) Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
 - 2) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
 - 3) Melaksanakan penyelenggaraan administrasi di bidang sosial budaya;
 - 4) Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
 - 5) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
 - 6) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Disamping tupoksi tersebut Kecamatan Mojoagung juga mempunyai fungsi kewilayahan sebagai Pusat pelayanan pemerintahan, jasa komersial skala WP, pendidikan tinggi dan menengah, serta kesehatan wilayah dengan sistem kegiatan wilayah pemerintahan, perdagangan

dan jasa komersial. Berdasarkan hal tersebut tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Kecamatan Mojoagung maka implementasi dari tupoksi Kecamatan Mojoagung juga diharapkan mencapai fungsi kewilayahan tersebut.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Mojoagung

Jumlah total sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Mojoagung adalah 20 Orang dengan klasifikasi golongan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sumber Daya SKPD berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	1 Orang
2	Golongan III	11 Orang
3	Golongan II	8 Orang
4	Golongan 1	0 Orang

Sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang cukup bervariatif. Berikut ini Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan:

Tabel 2.2
Sumber Daya SKPD berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal
Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana s2	2 Orang
2	Sarjana S1	8 Orang
3	Diploma III	1 Orang
4	SLTA	7 Orang
5	SLTP	2 Orang
6	SD	0 Orang

Sumber : Data Kecamatan Mojoagung

Rincian personil pegawai Kantor Kecamatan Mojoagung, mulai dari jabatan eselon III dan IV, serta staf pada Kantor Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang per bulan April 2023 adalah sebagaimana tersaji dalam beberapa tabel berikut:

Tabel 2.3
Pegawai Jabatan Struktural Eselon III dan IV

No .	Nama	NIP	Jabatan
1	MUCHTAR, S.IP., M.Si	1972062119980310 05	Camat Mojoagung
2	WAHYU TEGUH WICAKSONO, S.STP	1982031720001210 01	Sekcam Mojoagung
3	Drs. ABD.ROCHMAN	1965051419870310 10	Kasi PMD
4	AMINATUS SA'ADAH, S.IP	1969042519891220 01	Kasi Tapem
5	DWI HERAWATI, S.IP	1969040419890320 08	Kasi Sosial Budaya
6	MULYONO, S.Sos	1965102819890810 01	Kasi Trantibum
7.	VITA OCTAVIANTI, SE	1986100120150520 02	Kasubbag Keuangan dan Sungram
8.	ANNA SUBANDYAH R,S.Pd, M.Si	1970062420080120 08	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.4
Staf/Pelaksana

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	TAUFIQ	196707091990031005	Staf

2	HERU SUSANTO	196602222006041009	Staf
3	KHALIMAH AL AZIZ	197704012010012001	Staf
4	DODI ERIANTO, SE	198010142010011001	Staf
5	SODIKIN	198001152014071000	Staf
6	MASHUDI	196703062007011016	Staf
7	RUKAN	197208152010011004	Staf
8	HERI SUBAGYO	196910192009061002	Staf
9	YULIANI	196708142009062001	Staf
10.	HARIANTO	197412222007011009	Staf
11.	SUSANTI	197711262008012009	Staf
12.	ROJIUN HERU WIDODO	197202072009061002	KEPALA DESA

Tabel 2.5
Jenjang Pendidikan Non Formal yang pernah ditempuh oleh
Sumber Daya SKPD

Sumber Daya	Jenis Diklat		
	Kepemimpinan	Fungsional	Teknis
Manusia			
Struktural (8 Orang)	5 Sertifikat (5 orang)	- Sertifikat	3 Sertifikat (2 orang)
Fungsional (- Orang)	- Sertifikat	- Sertifikat	- Sertifikat
Staf (13 Orang)	- Sertifikat	- Sertifikat	- Sertifikat

Sumber: Data DUK Kecamatan Mojoagung

Secara keseluruhan jumlah perlengkapan kantor yang dikelola oleh Kecamatan Mojoagung dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi adalah sebanyak buah Sarana dan

prasaranan Kerja yang Tersedia di Kecamatan Mojoagung.

Tabel 2.6
Sarana dan Prasaranan beserta Kondisinya
Inventaris Barang

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
I	Kendaraan Dinas Jabatan				
1	Kendaraan Dinas R4	2	1	-	1
2	Kendaraan Dinas R2	11	11	-	-
II	Perlengkapan Gedung Kantor				
1	Scanner	5	5	-	-
2	AC	9	8	-	1
3	Mesin Tik manual	1	-	-	1
4	Rak Besi	3	3		
5	Filling Besi	10	10	-	
6	Rak Kayu	2	2	-	
7	White Board	3	2	1	
8	Lemari Kayu	2	2	-	
9	Zice	2	2	-	
10	Tempat Tidur Kayu	1	1	-	
11	Meja Rapat	7	6	1	
12	Meja Kerja	20	15	5	
13	Kursi Rapat	187	150	37	
14	Kursi Biasa	28	28		
15	Kursi Besi	6	4	6	2
16	Bangku Tunggu	5	5		
17	Kursi Lipat	95	50	45	

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
18	Meja Resepsonis	2	2	-	
19	Jam	-	-		
20	Kipas Angin	12	9	4	
21	Kompor Gas	1			1
22	Alat Dapur lainnya	1 set			
23	Televisi	5	5		
24	Podium	1	1		
25	P C	11	9	2	
26	Laptop	9	8		1
27	Notebook	4	4		2
28	Printer	17	14	-	3
29	CCTV	1 set	1 set		
30	Monitor	1			
31	Meja kerja pejabat eselon III	1	1		
32	Kursi kerja pejabat eselon III	1	1		
33	Kursi kerja pejabat eselon IV	1	1		
34	Camera + attachment	1	1		
35	Telephone Hybrid	1	-		1
36	Mesin Pres	-	-		
37	Soundsystem	2	2		
38	Tape recorder	1			1
39	Adaptor	-			-
40	Alat pemadam kebakaran	3	3		
41	Digital LED Running Text	1	1		
42	Mesin Absensi	1	1		

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
43	Papan Nama Instansi	2	2		
44	Layar Film Projector	1	1		
45	Rak Buku				
46	APE (Alat Permainan Edukatif)	1	1		
47	Papan Pengumuman	1	1		

Sumber Data: Daftar Inventaris Barang

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Kecamatan dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojoagung
Kabupaten Jombang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target P-Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Renstra PD Tahun 2018-2023																		
	Sasaran : Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah																		
	Nilai Evaluasi SAKIP				71	65,23	N/A	N/A	N/A	63,33	64,02	N/A	N/A	N/A	89,2%	98,15%	N/A	N/A	N/A
1	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A
	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				rekening 17	rekening 17	N/A	N/A	N/A	rekening 17	rekening 17	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target P-Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
2	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan				N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor				N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah gedung kantor/bangunan pendukungnya yang dipelihara				N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara				N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah kendaraan dinas/kendaraan operasional yang dipelihara				N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga				N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase dokumen Perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu				N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target P-Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah Dokumen Renja yang disusun				N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A			100 %	100 %	100 %	N/A	N/A
	Jumlah Dokumen LKJIP yang disusun				N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun				N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan																		
4	NILAI SINERGITAS KINERJA KECAMATAN MOJOAGUNG MINIMAL BAIK									N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Nilai Komponen Sinergitas Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum				75	76	N/A			N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Nilai Komponen Sinergitas Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				komponen	komponen	N/A			N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Nilai Komponen Sinergitas Bidang Sosial Budaya				11	11	N/A			N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target P-Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Nilai Komponen Sinergitas Bidang Pemerintahan dan Umum				22 komponen	22 komponen	N/A	N/A	N/A	22 komponen	22 komponen	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A
	Perubahan P-Renstra PD Tahun 2018 - 2023 (2022)																		
	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Mojoagung																		
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI			N/A	N/A	66,00	73,39	N/A	N/A	60,89	N/A	N/A	N/A	N/A	82,96%	N/A	N/A		
1.	NILAI EVALUASI AKIP Kecamatan			N/A	N/A	70,01	72	N/A	N/A	71,24	N/A	N/A	N/A	N/A	101,76%	N/A	N/A		
1.	Persentase rata-rata kinerja aparatur			N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A		
1.1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan			N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A		
1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun			N/A	N/A	3 dokumen	2 dokumen	N/A	N/A	3 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target P-Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.1.2	Jumlah laporan edung kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun			N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	1 dokument	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
1.2	1. Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan			N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
1.2.1	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kecamatan Mojoagung yang di fasilitasi			N/A	N/A	14 bulan	14 bulan	N/A	N/A	N/A	14 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
1.2.2	Jumlah pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD			N/A	N/A	N/A	12 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
1.2.3	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD			N/A	N/A	1 dok	1 dok	N/A	N/A	N/A	1 dok	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
1.3	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
1.3.1	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi			N/A	N/A	7 jenis	7 jenis	N/A	N/A	N/A	7 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
1.3.2	Jumlah komponen instalasi listrik yang terfasilitasi			N/A	N/A	4 jenis	4 jenis	N/A	N/A	N/A	4 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target P-Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.3.3	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi			N/A	N/A	6006 orang	0 orang	N/A	N/A	N/A	6006 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
1.3.4	Jumlah pemenuhan barang cetak			N/A	N/A	12 buku	8 buku	N/A	N/A	N/A	12 buku	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
1.3.5	Jumlah pemenuhan barang penggandaan			N/A	N/A	7500 lembar	7500 lembar	N/A	N/A	N/A	7500 lembar	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
1.3.6	Jumlah pemenuhan bahan bacaan			N/A	N/A	1 jenis	1 jenis	N/A	N/A	N/A	1 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
1.3.7	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			N/A	N/A	165 kali	2 kali	N/A	N/A	N/A	165 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
1.4	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Kecamatan Mojoagung			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1.4.1	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang terfasilitasi			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1.5	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur			N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
1.5.1	Jumlah pengadaan sarana edung kantor			N/A	N/A	1 unit	36 unit	N/A	N/A	N/A	1 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
1.6	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah			N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target P-Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi			N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	N/A	N/A	N/A	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum			N/A	N/A	4 jenis	4 jenis	N/A	N/A	N/A	4 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
1.7	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara			N/A	N/A	2 unit	2 unit	N/A	N/A	N/A	2 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajaknya			N/A	N/A	26 unit	16 unit	N/A	N/A	N/A	26 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	Jumlah edung kantor dan bangunan lainnya Kecamatan Mojoagung yang dipelihara			N/A	N/A	5 gedung	5 gedung	N/A	N/A	N/A	5 gedung	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	Jumlah sarana dan prasarana edung kantor yang dipelihara			N/A	N/A	25 unit	35 unit	N/A	N/A	N/A	25 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			N/A	N/A	7,94	7,91	N/A	N/A	N/A	7,94	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target P-Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan								N/A										
2.	IKM KECAMATAN MOJOAGUNG				N/A	N/A	87,64	91,50	N/A	N/A	N/A	90,55	N/A	N/A	N/A	N/A	103,32%	N/A	N/A
3.	IPP KECAMATAN MOJOAGUNG				N/A	N/A	3,7	3,75	N/A	N/A	N/A	3,301	N/A	N/A	N/A	N/A	89,22%	N/A	N/A
2.	Nilai PATEN Kecamatan				N/A	N/A	83	83,50	N/A	N/A	82,76	83,01	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
	KEGIATAN :								N/A										
2.1	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar				N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
2.1.1	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi				N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi				N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
3.	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan				N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti				N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
3.1	KEGIATAN								N/A										
	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA				N/A	N/A	2 laporan	2 laporan	N/A	N/A	N/A	2 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target P-Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam			N/A	N/A	0	4 dokumen	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan			N/A	N/A	2 kegiatan	2 kegiatan	N/A	N/A	N/A	2 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam			N/A	N/A	-	1 laporan	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait			N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
4.	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait			N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	KEGIATAN			N/A	N/A			N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum			N/A	N/A	12 laporan	12 laporan	N/A	N/A	N/A	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan			N/A	N/A	12 kegiatan	12 kegiatan	N/A	N/A	N/A	12 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target P-Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
										N/A									
5.	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu			N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
5.	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa			N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti			N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	KEGIATAN							N/A								100%			
	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa			N/A	N/A	36 dokumen	36 dokumen	N/A	N/A	N/A	36 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa			N/A	N/A	36 laporan	36 laporan	N/A	N/A	N/A	36 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
								N/A								100%			
6.	Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu			N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target P-Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
6.	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi 2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina			N/A	N/A	100% 36 lembaga	100% 36 lembaga	N/A	N/A	100% 36 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A		
	KEGIATAN							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Raperdes Perubahan APB Desa yang tepat waktu			N/A	N/A	36 dok	36 dok	N/A	N/A	36 dok	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A		
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina			N/A	N/A	36 lembaga	36 lembaga	N/A	N/A	36 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A		
	SUB KEGIATAN Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa			N/A	N/A	36 dokumen	36 dokumen	N/A	N/A	36 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A		
	Jumlah BUMDesa yang dikordinasikan			N/A	N/A	18 BUMDesa	18 BUMDesa	N/A	N/A	18 BUMDesa	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A		
	Jumlah TP PKK yang dikordinasikan			N/A	N/A	18 TP PKK Desa	18 TP PKK Desa	N/A	N/A	18 TP PKK Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A		
	Perubahan P-Renstra PD Tahun 2018 - 2023 (2022) Kepmendagri 050-05889																		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target P-Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	I. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Mojoagung																		
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI				N/A	N/A	N/A	N/A	76,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.	NILAI SAKIP				N/A	N/A	N/A	N/A	72,10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur				N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.1	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan				N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				N/A	N/A	N/A	N/A	2 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.1.2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				N/A	N/A	N/A	N/A	5 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target P-Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.2	1. Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.2.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			N/A	N/A	N/A	N/A	20 orang		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.2.2	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			N/A	N/A	N/A	N/A	12 dok		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.2.3	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			N/A	N/A	N/A	N/A	1 dok		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.3	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			N/A	N/A	N/A	N/A	100%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.3.1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			N/A	N/A	N/A	N/A	7 paket		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.3.2	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			N/A	N/A	N/A	N/A	6 paket		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target P-Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.3.3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			N/A	N/A	N/A	N/A	12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.3.4	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			N/A	N/A	N/A	N/A	12 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.3.6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			N/A	N/A	N/A	N/A	1 dok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.3.7	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.4	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Kecamatan Mojoagung			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.4.1	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.5	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur			N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.5.1	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			N/A	N/A	N/A	N/A	59 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.6	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target P-Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.7	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.	Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan																		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target P-Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	INDEKS KUALITAS LAYANAN PUBLIK			N/A	N/A	N/A	N/A	8,09	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2.	IKM KECAMATAN MOJOAGUNG			N/A	N/A	N/A	N/A	89,75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3.	IPP KECAMATAN MOJOAGUNG			N/A	N/A	N/A	N/A	3,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2.	Nilai PATEN Kecamatan			N/A	N/A	N/A	N/A	83,50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	KEGIATAN :					N/A	N/A			N/A									
2.1	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar			N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2.1.1	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3.	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan			N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti			N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3.1	KEGIATAN					N/A	N/A												
	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA			N/A	N/A	N/A	N/A	2 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam			N/A	N/A	N/A	N/A	4 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target P-Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	KEGIATAN									N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target P-Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
5.	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tepat Waktu			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	KEGIATAN																		
	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa			N/A	N/A	N/A	N/A	36 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			N/A	N/A	N/A	N/A	36 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.	Persentase Evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target P-Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
6.	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi 2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina			N/A	N/A	N/A	N/A	100% 36 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	KEGIATAN								N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina			N/A	N/A	N/A	N/A	36 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			N/A	N/A	N/A	N/A	4 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Mojoagung
Kabupaten Jombang

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-							Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
RENSTRA PD TAHUN 2018 - 2023																	
Program Pelayanan administrasi perkantoran	233,012,500	167,718,5 10	N/A	N/A	N/A	227,369, 230	164,007, 822	N/A	N/A	N/A	97	99	N/A	N/A	N/A	38.93	-38.63
Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	250,812,500	167,718,51 0	N/A	N/A	N/A	227,369,2 30	164,007,8 22	N/A	N/A	N/A	97	99	N/A	N/A	N/A	49.54	-38.63
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	132,382,500	405,482,5 00	N/A	N/A	N/A	132,177, 045	398,817, 150	N/A	N/A	N/A	99	99	N/A	N/A	N/A	67.35	66.86
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional			N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	90,100,000	197,491,50 0	N/A	N/A	N/A	89,934,54 5	195,569,1 50	N/A	N/A	N/A	100	98	N/A	N/A	N/A	54.38	54.01
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	11,832,500	200,000,00 0	N/A	N/A	N/A	11,832,50 0	195,257,0 00	N/A	N/A	N/A	100	99	N/A	N/A	N/A	94.08	93.94
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	6,950,000	7,991,000	N/A	N/A	N/A	6,910,000	7,991,000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	13.03	13.53

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-							Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	13,100,000	-	N/A	N/A	N/A	13,100,000	-	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	10,400,000	-	N/A	N/A	N/A	10,400,000	-	N/A	N/A	N/A	100		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD	28,125,000	7,230,000	N/A	N/A	N/A	28,125,000	7,230,000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	289.00	-289.00
Penyusunan rencana strategis SKPD		-	N/A	N/A	N/A		-	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	15,200,000	4,080,000	N/A	N/A	N/A	15,200,000	4,080,000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	272.5	-119.36
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	8,950,000	3,150,000	N/A	N/A	N/A	8,950,000	3,150,000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	184.13	-26.19
Penyusunan laporan keuangan SKPD	3,975,000	-	N/A	N/A	N/A	3,975,000	-	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan	201,750,000	55,350,000	N/A	N/A	N/A	200,593,000	55,350,000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	264.50	-262.41
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,000,000	4,900,000	N/A	N/A	N/A	15,000,000	4,900,000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	206.12	-206.12

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-							Rata-rata Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	63,800,000	27,250,000	N/A	N/A	N/A	63,800,000	27,250,000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	134.13	-134.13	
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Sosial Budaya	30,000,000	5,850,000	N/A	N/A	N/A	30,000,000	5,850,000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	412.82	-412.82	
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa	92,950,000	17,350,000	N/A	N/A	N/A	91,793,000	17,350,000	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	435.73	-429.07	
PERUBAHAN RENSTRA PD TH 2018 - 2023																		
Program:	N/A	N/A	3,472,374,546	3,198,353,375	N/A	N/A	N/A	2,606,839,991	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.086	N/A	
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota																		
Kegiatan:	N/A	N/A	13,194,500	4,167,600	N/A	N/A	N/A	12,664,500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.17	N/A	
Sub Kegiatan :																		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	N/A	8,439,000	2,547,600	N/A	N/A	N/A	8,039,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.31	N/A	

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-							Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	N/A	4,755,500	1,620,000	N/A	N/A	N/A	4,625,500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.94	N/A
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	N/A	3,176,087,8 86	2,991,570,3 75	N/A	N/A	N/A	2,138,377,6 62	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.061 7	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	3,170,087,8 86	2,918,212,3 75	N/A	N/A	N/A	2,133,007,6 62	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	N/A		71,598,000	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	N/A	N/A	6,000,000	1,760,000	N/A	N/A	N/A	5,370,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.41	N/A
Kegiatan: Administrasi Kepegawaiuan Perangkat Daerah	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	N/A	94,177,660	20,408,500	N/A	N/A	N/A	102,115,660	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.61	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-							Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	N/A	10,882,660	9,594,800	N/A	N/A	N/A	16,410,660	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.13	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	N/A	N/A	60,060,000	0	N/A	N/A	N/A	53,130,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	N/A	N/A	2,151,000	4,689,000	N/A	N/A	N/A	2,151,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.54	N/A
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	N/A	N/A	2,400,000	2,352,000	N/A	N/A	N/A	2,400,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.02	N/A
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	N/A	18,684,000	2,972,000	N/A	N/A	N/A	28,024,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-5.29	N/A
Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	N/A	N/A	-	800,700	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.00	N/A
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	N/A	N/A	11,438,900	36,648,000	N/A	N/A	N/A	10,995,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.69	N/A
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	11,438,900	36,648,000	N/A	N/A	N/A	10,995,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.69	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-							Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	100,856,000	98,846,900	N/A	N/A	N/A	107,374,569	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.020	N/A
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	N/A	N/A	14,832,000	32,846,900	N/A	N/A	N/A	21,461,468	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.55	N/A
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A	N/A	86,024,000	66,000,000	N/A	N/A	N/A	85,913,101	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.30	N/A
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	76,619,600	46,712,000	N/A	N/A	N/A	235,312,600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.64	N/A
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	N/A	N/A	46,825,000	30,660,000	N/A	N/A	N/A	46,824,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.53	N/A
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	N/A	19,394,600	8,452,000	N/A	N/A	N/A	178,088,600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.29	N/A
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	10,400,000	7,600,000	N/A	N/A	N/A	10,400,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-0.37	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-							Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	N/A	N/A	18,720,000	4,700,000	N/A	N/A	N/A	22,800,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.98	N/A
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	N/A	18,720,000	4,700,000	N/A	N/A	N/A	22,800,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.98	N/A
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	N/A	18,720,000	4,700,000	N/A	N/A	N/A	22,800,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.98	N/A
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	N/A	24,256,200	-	N/A	N/A	N/A	13,557,200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A	N/A	24,256,200	-	N/A	N/A	N/A	13,557,200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	N/A	N/A	24,256,200	-	N/A	N/A	N/A	13,557,200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-							Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	N/A		-	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	N/A	9,650,000	3,850,000	N/A	N/A	N/A	9,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.51	N/A
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	N/A	9,650,000	3,850,000	N/A	N/A	N/A	9,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.51	N/A
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A	N/A	9,650,000	3,850,000	N/A	N/A	N/A	9,000,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.51	N/A
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	11,400,000	12,935,400	N/A	N/A	N/A	13,050,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.12	N/A
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	11,400,000	12,935,400	N/A	N/A	N/A	13,050,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.12	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-							Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	N/A	N/A	11,400,000	12,935,400	N/A	N/A	N/A	13,050,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.12	N/A
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	N/A	N/A	40,647,600	14,961,600	N/A	N/A	N/A	40,347,600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.72	N/A
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	N/A	N/A	40,647,600	14,961,600	N/A	N/A	N/A	40,347,600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.72	N/A
Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	N/A	N/A	40,647,600	14,961,600	N/A	N/A	N/A	40,347,600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.72	N/A
PERUBAHAN RENSTRA PD TH 2018 - 2023 (KEPMENDAGRI 050-05889)																	
Program:	N/A	N/A	N/A	N/A	3,036.207.4 24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota																	
Kegiatan:	N/A	N/A	N/A	N/A	7.918.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-							Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan :																	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	5.868.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	2.050.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan:																	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	2.609.978.2 74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan :																	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	2.535.355.2 74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	71.598.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	3.025.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan:																	
Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-							Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	115.283.600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	15.769.500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	57.750.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	N/A	N/A	N/A	N/A	6.652.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	N/A	N/A	N/A	N/A	2.352.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-							Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	N/A	N/A	N/A	31.792.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	N/A	N/A	N/A	N/A	967.300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	54.115.026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	54.115.026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	99.227.124	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-							Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	N/A	N/A	N/A	N/A	25.427.124	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	N/A	N/A	N/A	N/A	73.800.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	59.833.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	N/A	N/A	N/A	N/A	36.348.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	9.335.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-							Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	N/A	N/A	N/A	14.150.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program:																	
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	N/A	N/A	N/A	N/A	5.340.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan :																	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	5.340.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan:																	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	5.340.200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-							Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	N/A	N/A	N/A	29.233.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	29.233.800	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	N/A	N/A	N/A	N/A	24.032.400	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	5.201.400	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	N/A	N/A	N/A	5.460.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-							Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	5.460.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A	N/A	N/A	N/A	5.460.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	6.498.100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	6.498.100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan:	N/A	N/A	N/A	N/A	6.498.100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-							Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																	
Program:																	
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A	43.320.100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kegiatan:																	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	N/A	N/A	N/A	N/A	43.320.100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sub Kegiatan:																	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	43.320.100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Apabila ditarik rata-rata 3 (tiga) tahun kebelakang, akuntabilitas kinerja Kecamatan Mojoagung berdasarkan Pengukuran Kinerja Keuangan mencapai angka 98,53% dan termasuk kategori "Sangat Memuaskan". Capaian kinerja ini dapat dijadikan proyeksi dari hasil pengukuran masing-masing indikator kinerja per kegiatan dari masing-masing seksi/subbag pada Kecamatan Mojoagung.

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Adapun tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Mojoagung adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya dikarenakan kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai, hal ini menjadi Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Mojoagung secara internal.
2. Secara eksternal Kecamatan Mojoagung lebih dominan sebagai wilayah industri dikarenakan aksesnya yang begitu mudah, baik akses Kabupaten/Kota, maupun akses antar Provinsi. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan industri maupun perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Mojoagung. Sehingga untuk mendukung program penertiban sosial ini perlu ditingkatkan dan kordinasi lebih intens dengan SKPD yang terkait.
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.

4. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik sehingga peran Kecamatan Mojoagung harus lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan informasi bagi masyarakat.
5. Perlunya meningkatkan pelayanan yang mudah dijangkau dan sederhana sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat.
6. Banyaknya implementasi kebijakan mengenai pendeklegasian sebagian tugas dan wewenang Bupati kepada Camat.

Sedangkan Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Mojoagung antara lain:

1. Kecamatan sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah yang harus melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga diperlukan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.
2. Kecamatan Mojoagung yang tenteram dan nyaman meski sebagai salah satu kecamatan yang didominasi wilayah industri dan merupakan kawasan jalur kendaraan antar Kota antar Provinsi serta daerah perekonomian.
3. Perencanaan daerah yang berkualitas perlu dukungan serta aspirasi dari masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk itulah, perlu partisipasi dan peran serta dari berbagai pihak dalam setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Mojoagung.
4. Sejalan dengan kemajuan zaman, media informasi dari berbagai jenis perlu dikembangkan di Kecamatan Mojoagung. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, akan semakin meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, informasi dapat digunakan untuk mengenalkan potensi Kecamatan Mojoagung.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan. Peraturan ini memberikan peluang bagi kecamatan untuk melaksanakan pelayanan perizinan.
6. Adanya peluang mengenai pendeklegasian sebagian tugas dan wewenang Bupati kepada Camat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

KECAMATAN MOJOAGUNG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Kecamatan yang merupakan organisasi yang berinteraksi begitu dekat dengan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks diantaranya adalah :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi	
1	2	3	4	Internal	Eksternal
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan publik di Kecamatan	Peraturan tentang pelayanan publik, SOP, SPP	Adanya keterbatasan anggaran di DPA Kecamatan Mojoagung	Tuntutan masyarakat atas fasilitasi pelayanan publik yang tinggi
		Masih rendahnya kualitas dan kompetensi aparatur pelayanan di Kecamatan	Peraturan tentang pelayanan publik, SOP, SPP	Keterbatasan SDM, SDM Kecamatan masih kurang baik dari segi skill maupun kuantitas	Tuntutan masyarakat terharap pelayanan yang baik cukup tinggi
2.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Masih banyaknya pemerintah desa yang terlambat dalam menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes	Peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan	Kurangnya Koordinasi antar desa dengan kecamatan masih	Kesadaran pemerintahan Desa terhadap tanggung

			belanja daerah	belum sempurna	jawab penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes
2.	Program Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Masih banyaknya pemerintah desa yang tidak melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa	Peraturan tentang Pemberdayaan desa	Kurangnya Koordinasi desa dengan opd lain yang masih belum sempurna	Kesadaran pemerintahan Desa untuk melakukan musyawarah antar opd lain
		Belum optimalnya koordinasi antara kecamatan dan desa sehingga penyusunan RKPDes belum tepat waktu	Peraturan musdes RKPDes	Kurangnya Koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan Desa antar desa dengan	Tuntutan masyarakat agar RKP Desa yang dihasilkan lebih berkualitas, disusun benar-benar lahir atas

			kecamatan masih belum sempurna	usulan masyarakat desa setempat, serta programnya menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat
--	--	--	--------------------------------	---

dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

1. Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan publik di Kecamatan karenanya adanya keterbatasan anggaran di DPA Kecamatan Mojoagung;
2. Jumlah SDM belum sesuai dengan analisa jabatan, SDM Kecamatan masih kurang baik dari segi skill maupun kuantitas;
3. Belum optimalnya koordinasi antara kecamatan dan desa sehingga penyusunan RKPDes belum tepat waktu;
4. Masih banyaknya pemerintah desa yang terlambat dalam menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes;
5. Masih banyaknya pemerintah desa yang tidak melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Karena letaknya yang sangat strategis, maka kegiatan pembangunan Kabupaten Jombang tidak bisa melepaskan dirinya dari faktor-faktor sumberdaya dan kondisi pembangunan diluar Kabupaten Jombang. Tuntutan era dan warga dengan mempertimbangkan posisi geografis dan geostrategis terutama dalam tiga tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kabupaten Jombang kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah transportasi, kependudukan, ketenagakerjaan, sektor informal, investasi, berbagai infrastruktur dan rendahnya kualitas daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen.

Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan agenda strategis yang dalam pencapaiannya harus didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan aset sebagai pembiayaan alternatif, reformasi birokrasi, dan sistem pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab.

Sebagaimana diketahui arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 ada 3 (tiga) yaitu:

- **Tahun 2024**

Meningkatkan daya dukung Infrastruktur berkelanjutan yang mendorong industry agribisnis dan pembangunan wilayah.

- **Tahun 2025**

Penguatan Daya Saing SDM dan Ekonomi Melalui Hilirisasi Agrobisnis

- **Tahun 2026**

Agribisnis yang ditopang sector unggulan lainnya.

Mewujudkan Integrasi Sektor Perdagangan dan Industri

Arah Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat sebagai agen *controlling* dalam pelaksanaan kebijakan – kebijakan pemerintah sangat diperlukan dalam tercapainya *good governance*. Pemerintah juga dituntut harus transparan dalam menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dari arah kebijakan tersebut, program pembangunan Kecamatan Mojoagung disusun untuk mendukung pencapaian Tujuan PD yaitu, yakni Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dengan indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten.

Adapun Sasaran PD ada 2 (dua) dan yang pertama adalah

Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan

dengan Indikator Sasaran yaitu **Nilai Evaluasi AKIP Kec.**

Mojoagung. Sedangkan Sasaran PD yang kedua adalah **Meningkatnya Kualitas Layanan Publik** dengan Indikator Sasaran (Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Perumusan Rancangan Awal RPJPD harus mencakup beberapa aspek dan salah satunya adalah isu strategis daerah. Oleh karenanya isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan.

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Jombang yang sejalan dengan Tupoksi Kecamatan Mojoagung dapat dikategorikan dalam uraian-uraian dibawah ini:

1. Kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat menjadi peluang untuk memberdayakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan.
2. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan

pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif dikomunikasikan kepada masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
4. Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai OPD yang mengkoordinasi kegiatan yang dilaksanakan di desa. Sehingga pembinaan serta pengkoordinasian mengenai

kewilayahan di lingkungan desa dan kecamatan, dapat diarahkan sesuai dengan pola pengembangan.

5. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Manajemen keuangan dan barang daerah menjadi hal strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan, karena sebagai salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan melalui pelaksanaan manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah yang berorientasi kepada kinerja untuk mendukung terciptanya Good Goverment di Kecamatan.

Melalui penataan perencanaan, penganggaran dan pengeluaran, agar pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan konsep Value For Money sehingga tercipta akuntabilitas publik. Demikian pula dengan manajemen barang daerah dilaksanakan melalui tahapn perencanaan kebutuhan, penganggaran.

6. Kecamatan Mojoagung merupakan kawasan dengan tipologi industri dan daerah perdagangan. Industri dan daerah perdagangan di Kecamatan Mojoagung menjadi potensi bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian. Kecamatan Mojoagung memiliki sentra industri sarung tenun, industri sepatu, serta pengolahan bijih plastik.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bahwasanya Tujuan dan sasaran Kecamatan Mojoagung mendukung tercapainya tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 adalah merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal.

Tujuan yang akan diwujudkan dalam mencapai misi tersebut adalah :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik.

dengan sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
- Pernyataan tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan Mojoagung beserta indikatornya disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

(Tabel T-C.25 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET		
				2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Mojoagung	61,9	62	62,1
			1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	72,5	73	73,5
			Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	62,00	63,45	65,00
			2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	8,35	8,41	8,52

4.2 Cascading Kinerja PD

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARA N RPD	INDIKATO R SASARAN RPD	TUJUA N	INDIKATO R TUJUAN	SASARA N	INDIKAT OR SASARA N	PROGRA M	INDIKATO R PROGRA M	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIAT AN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	Indeks Good Governance (IGG)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Mojoagung	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Mojoagung	1. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojoagung	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARA N RPD	INDIKATO R SASARAN RPD	TUJUA N	INDIKATO R TUJUAN	SASARA N	INDIKAT OR SASARA N	PROGRA M	INDIKATO R PROGRA M	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIAT AN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
												2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARA N RPD	INDIKATO R SASARAN RPD	TUJUA N	INDIKATO R TUJUAN	SASARA N	INDIKAT OR SASARA N	PROGRA M	INDIKATO R PROGRA M	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIAT AN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
											2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
										2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARA N RPD	INDIKATO R SASARAN RPD	TUJUA N	INDIKATO R TUJUAN	SASARA N	INDIKAT OR SASARA N	PROGRA M	INDIKATO R PROGRA M	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIAT AN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
										Administrasi Kepegawai an Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Mojoagung	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	1. Penyedia n kompone n instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
												2. Penyedia an Peralatan dan Perlengk apaan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
												3. Penyedia an Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARA N RPD	INDIKATO R SASARAN RPD	TUJUA N	INDIKATO R TUJUAN	SASARA N	INDIKAT OR SASARA N	PROGRA M	INDIKATO R PROGRA M	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIAT AN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
												4. Penyediaan Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
												5. Penyediaan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan- undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan- undangan yang Disediakan
												6. Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARA N RPD	INDIKATO R SASARAN RPD	TUJUA N	INDIKATO R TUJUAN	SASARA N	INDIKAT OR SASARA N	PROGRA M	INDIKATO R PROGRA M	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIAT AN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
										Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
												2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARA N RPD	INDIKATO R SASARAN RPD	TUJUA N	INDIKATO R TUJUAN	SASARA N	INDIKAT OR SASARA N	PROGRA M	INDIKATO R PROGRA M	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIAT AN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
													Disediakan
												2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
												3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARA N RPD	INDIKATO R SASARAN RPD	TUJUA N	INDIKATO R TUJUAN	SASARA N	INDIKAT OR SASARA N	PROGRA M	INDIKATO R PROGRA M	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIAT AN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
												2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARA N RPD	INDIKATO R SASARAN RPD	TUJUA N	INDIKATO R TUJUAN	SASARA N	INDIKAT OR SASARA N	PROGRA M	INDIKATO R PROGRA M	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIAT AN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
												3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
					Indeks Reformasi Birokrasi (Kabupaten)	2. Meningkatnya kualitas layanan publik	2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojoagung	Program Penyeleenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan Mojoagung	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARA N RPD	INDIKATO R SASARAN RPD	TUJUA N	INDIKATO R TUJUAN	SASARA N	INDIKAT OR SASARA N	PROGRA M	INDIKATO R PROGRA M	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIAT AN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Percentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARA N RPD	INDIKATO R SASARAN RPD	TUJUA N	INDIKATO R TUJUAN	SASARA N	INDIKAT OR SASARA N	PROGRA M	INDIKATO R PROGRA M	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIAT AN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARA N RPD	INDIKATO R SASARAN RPD	TUJUA N	INDIKATO R TUJUAN	SASARA N	INDIKAT OR SASARA N	PROGRA M	INDIKATO R PROGRA M	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIAT AN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
								Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
								Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARA N RPD	INDIKATO R SASARAN RPD	TUJUA N	INDIKATO R TUJUAN	SASARA N	INDIKAT OR SASARA N	PROGRA M	INDIKATO R PROGRA M	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIAT AN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
										Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (*Strengths. Weaknesses, Opportunities, Threats*).

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan adalah : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pelayanan Umum serta pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa.

Berikut analisis SWOTnya :

1. Peluang

- a. Undang-Undang mengenai Kecamatan yang menyatakan bahwa perlunya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati guna menunjang pelayanan prima.
- b. Masyarakat aktif terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik dalam musrenbang Kecamatan
- c. Peluang kerjasama yang besar dengan pemerintah Desa dalam rangka mengembangkan potensi Kecamatan
- d. Peluang penataan dan pengembangan kawasan industri manufaktur non polutan yang sesuai dengan arah RTRW.

2. Ancaman

- a. Tumpang tindihnya Tupoksi Kecamatan dengan OPD teknis lainnya bilamana terjadi sebagian pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat
- b. Masyarakat banyak yang apatis untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan yang dibahas dalam musrenbang Kecamatan
- c. Wujud kerjasama Kecamatan dengan Pemerintah Desa seringkali mengalami kesulitan dalam hal koordinasi antar Pemerintah Desa dalam satu Kecamatan
- d. Ancaman masalah pengembangan kawasan industri non polutan terhadap lokasi yang strategis sesuai dengan

kebutuhan investor dan kekhawatiran adanya alih fungsi lahan produktif.

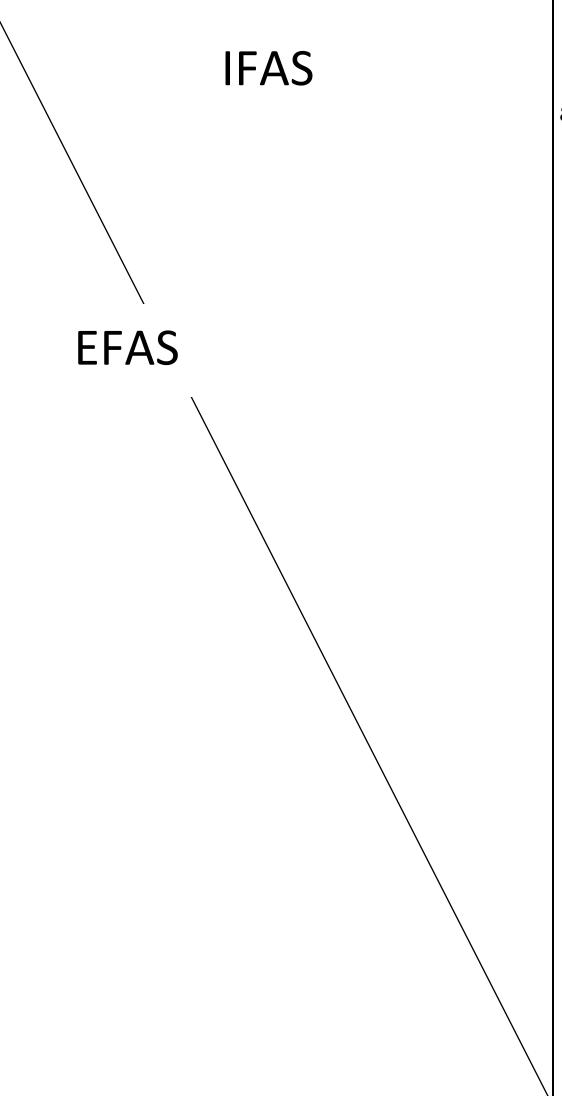
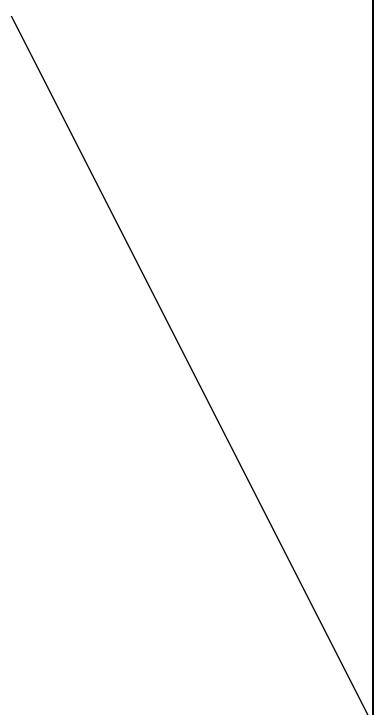
3. Kekuatan

- a. Adanya kewenangan yang sangat strategis dalam bidang koordinasi dan fasilitasi pembangunan antar Desa dalam satu Kecamatan guna menunjang
- b. SDM secara kapasitas terbilang cukup mumpuni dalam hal pemberian pelayanan maupun dalam menjalankan administrasi pemerintahan umum
- c. Tersedianya lahan yang dapat digunakan untuk menunjang arah rencanaan pembangunan kawasan industri non polutan
- d. Adanya alokasi anggaran yang tersedia bagi Kecamatan dalam menjalankan tupoksinya.

4. Kelemahan

- a. Terbatasnya kewenangan Kecamatan dalam menjalankan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang selama ini masih dilaksanakan oleh OPD teknis yang bersangkutan.
- b. Belum meratanya tingkat kopetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis.

- c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi.
- d. Alokasi anggaran Kecamatan yang terbatas dirasa kurang menunjang perencanaan pembangunan Kecamatan kedepan.
- e. Infrastruktur Kecamatan yang masih perlu peningkatan guna menarik investor dan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat.

<p>IFAS</p>  <p>EFAS</p> 	<p>Kekuatan (<i>Strengths</i>) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya kewenangan yang sangat strategis dalam bidang koordinasi dan fasilitasi pembangunan antar Desa dalam satu Kecamatan guna menunjang b. SDM secara kapasitas terbilang cukup mumpuni dalam hal pemberian pelayanan maupun dalam menjalankan administrasi pemerintahan umum c. Tersedianya lahan yang dapat digunakan untuk menunjang arah rencanaan pembangunan kawasan industri non polutan d. Adanya alokasi anggaran yang tersedia bagi Kecamatan dalam menjalankan tupoksinya. 	<p>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terbatasnya kewenangan Kecamatan dalam menjalankan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang selama ini masih dilaksanakan oleh SKPD teknis yang bersangkutan. b. Belum meratanya tingkat kopetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis. c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi. d. Alokasi anggaran Kecamatan yang terbatas dirasa kurang menunjang perencanaan pembangunan Kecamatan kedepan. e. Infrastruktur Kecamatan yang masih perlu peningkatan guna menarik investor dan percepatan pembangunan ekonomi

		masyarakat.
<p>Peluang (Opportunities) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang mengenai Kecamatan yang menyatakan bahwa perlunya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati guna menunjang pelayanan prima. b. Masyarakat aktif terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik dalam musrenbang Kecamatan c. Peluang kerjasama yang besar dengan pemerintah Desa dalam rangka 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan penyelenggaraan administrasi Kecamatan yang akuntabel 2) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan prima 3) Pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kapasitas sumber daya aparatur 4) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran 5) Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan 6) Meningkatkan kualitas sarana dan 	<p>Strategi WO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa 2) Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah 3) Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan 4) Peningkatan partisipasi

<p>mengembangkan potensi Kecamatan</p> <p>d. Peluang penataan dan pengembangan kawasan industri manufaktur non polutan yang sesuai dengan arah RTRW.</p>	<p>prasarana aparatur.</p>	<p>aparatur Kecamatan dalam kegiatan keagamaan.</p>
<p>Ancaman (Threats) :</p> <p>a. Tumpang tindihnya Tupoksi Kecamatan dengan SKPD teknis lainnya bilamana terjadi sebagian pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat</p> <p>b. Masyarakat banyak yang apatis untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan yang dibahas dalam musrenbang Kecamatan</p> <p>c. Wujud kerjasama Kecamatan</p>	<p>Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pelayanan administrasi perkatoran 2) Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan 3) Mengoptimalkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan 4) Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaran pembangunan Kecamatan 5) Meningkatkan jangkauan informasi potensi dan informasi prosedur pelayanan yang diterima masyarakat 	<p>Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa 2) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah 3) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan 4) Pengembangan produk lokal masyarakat sesuai potensi Kecamatan.

<p>dengan Pemerintah Desa seringkali mengalami kesulitan dalam hal koordinasi antar Pemerintah Desa dalam satu Kecamatan</p> <p>d. Ancaman masalah pengembangan kawasan industri non polutan terhadap lokasi yang strategis sesuai dengan kebutuhan investor dan kekhawatiran adanya alih fungsi lahan produktif.</p>	<p>6) Meningkatkan pembinaan kerukunan bermasyarakat</p> <p>7) Meningkatkan kegiatan seni, budaya, keagamaan, dan wawasan kebangsaan di masyarakat</p> <p>8) Meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan.</p>	
---	--	--

Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Tujuan Kecamatan, adapun strategi Kecamatan yaitu :

1. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi Kecamatan yang akuntabel
2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan prima
3. Pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kapasitas sumber daya aparatur
4. Peningkatan partisipasi aparatur Kecamatan dalam kegiatan keagamaan
5. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaran pembangunan Kecamatan
6. Pengembangan produk lokal masyarakat sesuai potensi Kecamatan
7. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan
8. Meningkatkan pembinaan kerukunan bermasyarakat
9. Meningkatkan kegiatan seni, budaya, keagamaan, dan wawasan kebangsaan di masyarakat
10. Meningkatkan jangkauan informasi potensi dan informasi prosedur pelayanan yang diterima masyarakat.

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan – kebijakan Kecamatan yaitu :

1. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan perijinan dan non perijinan
2. Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di bidang IPTEK dan IMTAQ
3. Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan yang partisipatif
4. Pengembangan potensi Kecamatan berbasis produk unggulan di tiap Desa (*One Village One Product*)
5. Sosialisasi dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
6. Pengembangan kegiatan seni, budaya, dan keagamaan yang berorientasi pada wawasan kebangsaan
7. Optimalisasi penyajian data dan informasi kepada masyarakat

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJAN RPD : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
TUJUAN . Meningkatnya akuntabilita s dan kinerja birokrasi	SASARAN 1 : 1.Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang professional, akuntabel, transparan dan efektif 2. Penyelenggaraan pelayanan public yang berkualitas dan bebas korupsi 3. System e-planning dan e-Budgetting dan e-procurement untuk akuntabilitas pelayanan 4. Pembuatan identitas penduduk seperti KTP dan KK bisa dilayani di	- Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan perijinan dan non perijinan - Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kecamatan yang partisipatif - Pengembangan potensi Kecamatan berbasis produk unggulan di tiap Desa (One Village One Product) - Sosialisasi dan
	SASARAN 2 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan instansi pemerintah		

		<p>Kantor Kecamatan.</p> <p>Adanya pelayanan secara online sehingga tidak terjadi penumpukan antrian di ruang tunggu pelayanan</p> <p>5. Adanya website kecamatan</p>	<p>optimalisasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>- Pengembangan kegiatan seni, budaya, dan</p>
--	--	---	---

		<p>yang bisa diakses masyarakat dan pemerintah desa sehingga tercapai informasi secara cepat dan tepat.</p> <p>6. Adanya sosialisasi tentang desa sadar hukum dan himbauan tentang penegakan perda/perkada .</p> <p>7. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Mojoagung</p>	<p>keagamaan yang berorientasi pada wawasan kebangsaan Pengembangan kapasitas sumber daya aparatur di bidang IPTEK dan IMTAQ</p> <p>- Optimalisasi penyajian data dan informasi</p>
--	--	---	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia),

keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Mojoagung pada periode Tahun 2024-2026.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Mojoagung adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.

2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Subkegiatan:

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Subkegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Indikator, sasaran dan rencana pencapaian program dan kegiatan tersaji dalam tabel-tabel berikut :

6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang periode 2024-2026

Tabel 6.1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
								K	A	K	A	K	A	K	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. MOJOAGUNG	7.01.0 1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	%	N/A	10 0	3,594,65 0,375	10 0	3,622,95 0,375	10 0	3,636,33 9,375	10 0	10,853,94 0,125	CAMAT	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	%	N/A	10 0	20,000,0 00	10 0	12,000,0 00	10 0	17,000,0 00	10 0	49,000,00 0	SEKRETARIS	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.01. 01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	2	5,000,00 0	2	7,000,00 0	3	9,000,00 0	7	21,000,00 0	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		

TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
								K	A	K	A	K	A	K	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
			7.01.0 1.2.01. 06	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapor an	N/A	5	15,000,0 00	5	5,000,00 0	5	8,000,00 0	15	28,000,00 0	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	%	N/A	10 0	2,995,81 0,375	10 0	2,996,41 0,375	10 0	2,996,81 0,375	10 0	8,989,031, 125	SEKRETARIS	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
					2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	%	N/A	10 0		10 0		10 0		10 0		SEKRETARIS	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.02. 01	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	N/A	21	2,918,21 2,375	21	2,918,21 2,375	21	2,918,21 2,375	63	8,754,637, 125	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	KECAMA TANMOJ OAGUNG		

TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
								K	A	K	A	K	A	K	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
			7.01.0 1.2.02. 03	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	N/A	12	71,598,00	12	71,598,00	12	71,598,00	36	214,794,00	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.02. 05	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	N/A	1	6,000,00	1	6,600,00	1	7,000,00	3	19,600,00	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan MOJOAGUNG	%	N/A	10	14,000,0	10	14,000,0	10	15,000,0	10	43,000,00	SEKRETARIS	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.05. 02	1. Pengadaan pakaiian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	N/A	42	14,000,0	42	14,000,0	42	15,000,0	12	43,000,00	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		

TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
								K	A	K	A	K	A	K	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
			7.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	N/A	10 0	104,840, 000	10 0	109,540, 000	10 0	119,529, 000	10 0	333,909,0 00	SEKRETARIS	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.06. 01	1. Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	N/A	10	1,000,00 0	12	1,100,00 0	15	1,500,00 0	37	3,600,000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.06. 02	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	N/A	25	18,000,0 00	25	19,800,0 00	25	20,000,0 00	75	57,800,0 0	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.06. 04	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	N/A	1	55,440,0 00	1	55,440,0 00	1	60,984,0 00	3	171,864,0 00	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
								K	A	K	A	K	A	K	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
			7.01.0 1.2.06. 05	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	N/A	2	8,000,00 0	2	8,800,00 0	2	9,645,00 0	6	26,445,00 0	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.06. 06	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	N/A	1	2,400,00 0	1	2,400,00 0	1	2,400,00 0	3	7,200,000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.06. 09	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	4	20,000,0 00	4	22,000,0 00	4	25,000,0 00	12	67,000,00 0	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.07	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	%	N/A	10 0	75,000,0 00	10 0	80,000,0 00	10 0	85,000,0 00	10 0	240,000,0 00	SEKRETARIS	KECAMA TANMOJ OAGUNG		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
								K	A	K	A	K	A	K	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
			7.01.0 1.2.07. 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	N/A	1	-	1	-	1	-	1	-	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.07. 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	15	75,000,000	20	80,000,000	10	85,000,000	45	240,000,000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	N/A	100	115,000,000	100	123,000,000	100	125,000,000	100	363,000,000	SEKRETARIS	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.08. 02	1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	N/A	24	25,000,000	24	28,000,000	24	30,000,000	72	83,000,000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
								K	A	K	A	K	A	K	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
			7.01.0 1.2.08. 04	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	24	90,000,00	24	95,000,00	24	95,000,00	72	280,000,00	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	N/A	100	270,000,000	100	288,000,000	100	278,000,000	100	836,000,000	SEKRETARIS	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.09. 02	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A	10	30,000,00	10	33,000,00	10	33,000,00	30	96,000,00	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.09. 09	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	N/A	2	200,000,000	2	210,000,000	2	200,000,000	6	610,000,000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		

TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
								K	A	K	A	K	A	K	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
			7.01.0 1.2.09. 10	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	20	40,000,000	25	45,000,000	25	45,000,000	70	130,000,000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
	2. Meningkatnya kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojoagung	7.01.0 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	Nilai	N/A	84,5	10,000,000	85	15,000,000	85,5	20,000,000	85,5	45,000,000	CAMAT	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	%	N/A	100	10,000,000	100	15,000,000	100	20,000,000	100	45,000,000	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
								K	A	K	A	K	A	K	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
			7.01.0 2.2.02. 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan (laporan admin duk, perijinan, dan non perijinan tiap bulan an)	N/A	12	10,000,000	12	15,000,000	12	20,000,000	36	45,000,000	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	KECAMATAN MOJOAGUNG		
			7.01.0 5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	%	N/A	100	35,000,000	100	37,000,000	100	45,000,000	100	117,000,000	CAMAT	KECAMATAN MOJOAGUNG		
					Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	%	N/A	100		100		100		100		CAMAT	KECAMATAN MOJOAGUNG		

TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
								K	A	K	A	K	A	K	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
			7.01.0 5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	lapora n	N/A	5	35,000,0 00	5	37,000,0 00	5	45,000,0 00	15	117,000,0 00	KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
					Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	doku men	N/A	4		4		4		4		KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 5.2.01. 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	orang (tidak hanya PHBN harus ada aktivitas pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa)	N/A	10 0	20,000,0 00	10 0	22,000,0 00	10 0	30,000,0 00	30 0	72,000,00	KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 5.2.01. 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	doku men	N/A	4	15,000,0 00	4	15,000,0 00	4	15,000,0 00	12	45,000,00	KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA	KECAMA TANMOJ OAGUNG		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
								K	A	K	A	K	A	K	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
			7.01.0 4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	%	N/A	10 0	9,000,00 0	10 0	16,500,0 00	10 0	18,000,0 00	10 0	42,000,0 0	CAMAT	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 4.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikordinasikan dengan instansi terkait	%	N/A	10 0	9,000,00 0	10 0	16,500,0 00	10 0	18,000,0 00	10 0	42,000,0 0	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		

TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
								K	A	K	A	K	A	K	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
			7.01.0 4.2.02. 01	Koordinasi/Siner gi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Lapor an	N/A	12	9,000,00 0	12	15,000,0 00	12	18,000,0 00	36	42,000,00 0	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
				7.01.0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	%	N/A	10 0	10,000,0 00	10 0	17,000,0 00	10 0	19,000,0 00	10 0	46,000,00 0	CAMAT	KECAMA TANMOJ OAGUNG	
				7.01.0 6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	desa	N/A	18	10,000,0 00	18	17,000,0 00	18	19,000,0 00	18	46,000,00 0	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG	

TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
								K	A	K	A	K	A	K	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
			7.01.0 6.2.01. 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	doku men (LRA SMT 1 dan LRA Akhir tahun)	N/A	36	10,000,000	36	17,000,000	36	19,000,000	108	46,000,000	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	%	N/A	100	60,000,000	100	67,000,000	100	71,000,000	100	198,000,000	CAMAT	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Lembaga	N/A	36	60,000,000	36	67,000,000	36	71,000,000	36	198,000,000	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
					Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	Desa	N/A	18		18		18		18		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	KECAMA TANMOJ OAGUNG		

TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
								K	A	K	A	K	A	K	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
			7.01.0 3.2.01. 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	lapora n	N/A	4	20,000,0 00	4	22,000,0 00	4	25,000,0 00	12	67,000,0 0	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 3.2.01. 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	lemba ga kemas yakata n (PKK, LPMD, Karang Taruna, RT, RW, Posyandu)	N/A	10 8	40,000,0 00	10 8	45,000,0 00	10 8	46,000,0 00	10 8	131,000,0 00	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA	KECAMA TANMOJ OAGUNG		

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang periode 2024-2026

Tabel 6.2 (Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)

TUJUAN 1	SASARAN 2	INDIKAT OR SASARA N 3	KODE 4	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 5	INDIKATOR 6	SATU AN 7	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022 8	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB 18	LOKASI 19		
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
								K	A	K	A	K	A	K	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. MOJOAGUNG	7.01.0 1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	%	N/A	10 0	3,594,65 0,375	10 0	3,622,95 0,375	10 0	3,636,33 9,375	10 0	10,853,94 0,125	CAMAT	KECAMATANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	%	N/A	10 0	20,000,0 00	10 0	12,000,0 00	10 0	17,000,0 00	10 0	49,000,0 0	SEKRETARIS	KECAMATANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.01. 0001	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	2	5,000,00 0	2	7,000,00 0	3	9,000,00 0	7	21,000,00 0	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN	KECAMATANMOJ OAGUNG		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
								K	A	K	A	K	A	K	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
			7.01.0 1.2.01. 0006	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	N/A	5	15,000,000	5	5,000,000	5	8,000,000	15	28,000,000	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.00 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	%	N/A	100	2,995,810,375	100	2,996,410,375	100	2,996,810,375	100	8,989,031,125	SEKRETARIS	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
					2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	%	N/A	100		100		100		100		SEKRETARIS	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.02. 0001	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	N/A	21	2,918,212,375	21	2,918,212,375	21	2,918,212,375	63	8,754,637,125	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	KECAMA TANMOJ OAGUNG		

TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
								K	A	K	A	K	A	K	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
			7.01.0 1.2.02. 0003	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	N/A	12	71,598,00	12	71,598,00	12	71,598,00	36	214,794,00	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.02. 0005	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	N/A	1	6,000,00	1	6,600,00	1	7,000,00	3	19,600,00	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan MOJOAGUNG	%	N/A	10	14,000,0	10	14,000,0	10	15,000,0	10	43,000,00	SEKRETARIS	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.05. 0002	1. Pengadaan pakaiian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	N/A	42	14,000,0	42	14,000,0	42	15,000,0	12	43,000,00	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
								K	A	K	A	K	A	K	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
			7.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	N/A	10 0	104,840, 000	10 0	109,540, 000	10 0	119,529, 000	10 0	333,909,0 00	SEKRETARIS	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.06. 0001	1. Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	N/A	10	1,000,00 0	12	1,100,00 0	15	1,500,00 0	37	3,600,000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.06. 0002	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	N/A	25	18,000,0 00	25	19,800,0 00	25	20,000,0 00	75	57,800,0 0	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.06. 0004	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	N/A	1	55,440,0 00	1	55,440,0 00	1	60,984,0 00	3	171,864,0 00	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
								K	A	K	A	K	A	K	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
			7.01.0 1.2.06. 0005	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	N/A	2	8,000,00 0	2	8,800,00 0	2	9,645,00 0	6	26,445,00 0	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.06. 0006	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	N/A	1	2,400,00 0	1	2,400,00 0	1	2,400,00 0	3	7,200,000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.06. 0009	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	N/A	4	20,000,0 00	4	22,000,0 00	4	25,000,0 00	12	67,000,00 0	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.07	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	%	N/A	10 0	75,000,0 00	10 0	80,000,0 00	10 0	85,000,0 00	10 0	240,000,0 00	SEKRETARIS	KECAMA TANMOJ OAGUNG		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
								K	A	K	A	K	A	K	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
			7.01.0 1.2.07. 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	N/A	1	-	1	-	1	-	1	-	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.07. 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	15	75,000,000	20	80,000,000	10	85,000,000	45	240,000,000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	N/A	100	115,000,000	100	123,000,000	100	125,000,000	100	363,000,000	SEKRETARIS	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.08. 0002	1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	N/A	24	25,000,000	24	28,000,000	24	30,000,000	72	83,000,000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		

TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
								K	A	K	A	K	A	K	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
			7.01.0 1.2.08. 0004	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	24	90,000,00	24	95,000,00	24	95,000,00	72	280,000,00	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	N/A	100	270,000,000	100	288,000,000	100	278,000,000	100	836,000,00	SEKRETARIS	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.09. 0002	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	N/A	10	30,000,00	10	33,000,00	10	33,000,00	30	96,000,00	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 1.2.09. 0009	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	N/A	2	200,000,000	2	210,000,000	2	200,000,000	6	610,000,00	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		

TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
								K	A	K	A	K	A	K	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
			7.01.0 1.2.09. 0010	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	20	40,000,000	25	45,000,000	25	45,000,000	70	130,000,000	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
	2. Meningkatnya kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojoagung	7.01.0 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	Nilai	N/A	84,5	10,000,000	85	15,000,000	85,5	20,000,000	85,5	45,000,000	CAMAT	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	%	N/A	100	10,000,000	100	15,000,000	100	20,000,000	100	45,000,000	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		

TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
								K	A	K	A	K	A	K	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
			7.01.0 2.2.02. 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	lapora n (lapor an admin duk, perijin an, dan non perijin an tiap bulan an)	N/A	12	10,000,0 00	12	15,000,0 00	12	20,000,0 00	36	45,000,0 0	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	%	N/A	10 0	35,000,0 00	10 0	37,000,0 00	10 0	45,000,0 00	10 0	117,000,0 00	CAMAT	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
					Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	%	N/A	10 0		10 0		10 0		10 0		CAMAT	KECAMA TANMOJ OAGUNG		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
								K	A	K	A	K	A	K	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
			7.01.0 5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	laporan	N/A	5	35,000,000	5	37,000,000	5	45,000,000	15	117,000,000	KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
					Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	dokumen	N/A	4		4		4		4		KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 5.2.01. 0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	orang (tidak hanya PHBN harus ada aktivitas pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa)	N/A	100	20,000,00	100	22,000,00	100	30,000,00	300	72,000,00	KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 5.2.01. 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	N/A	4	15,000,00	4	15,000,00	4	15,000,00	12	45,000,00	KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA	KECAMA TANMOJ OAGUNG		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
								K	A	K	A	K	A	K	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
			7.01.0 4	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	%	N/A	10 0	9,000,00 0	10 0	16,500,0 00	10 0	18,000,0 00	10 0	42,000,0 0	CAMAT	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 4.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikordinasikan dengan instansi terkait	%	N/A	10 0	9,000,00 0	10 0	16,500,0 00	10 0	18,000,0 00	10 0	42,000,0 0	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		

TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
								K	A	K	A	K	A	K	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
			7.01.0 4.2.02. 0001	Koordinasi/Siner gi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Lapor an	N/A	12	9,000,00 0	12	15,000,0 00	12	18,000,0 00	36	42,000,00 0	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
				7.01.0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	%	N/A	10 0	10,000,0 00	10 0	17,000,0 00	10 0	19,000,0 00	10 0	46,000,00 0	CAMAT	KECAMA TANMOJ OAGUNG	
				7.01.0 6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	desa	N/A	18	10,000,0 00	18	17,000,0 00	18	19,000,0 00	18	46,000,00 0	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG	

TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
								K	A	K	A	K	A	K	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
			7.01.0 6.2.01. 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	doku men (LRA SMT 1 dan LRA Akhir tahun)	N/A	36	10,000,000	36	17,000,000	36	19,000,000	108	46,000,000	KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	%	N/A	100	60,000,000	100	67,000,000	100	71,000,000	100	198,000,000	CAMAT	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	Lembaga	N/A	36	60,000,000	36	67,000,000	36	71,000,000	36	198,000,000	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
					Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	Desa	N/A	18		18		18		18		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	KECAMA TANMOJ OAGUNG		

TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATU AN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN 2022	TARGET RENSTRA								UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD					
								K	A	K	A	K	A	K	A				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19		
			7.01.0 3.2.01. 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	lapora n	N/A	4	20,000,0 00	4	22,000,0 00	4	25,000,0 00	12	67,000,0 0	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA	KECAMA TANMOJ OAGUNG		
			7.01.0 3.2.01. 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	lemba ga kemas yakata n (PKK, LPMD, Karang Taruna, RT, RW, Posyandu)	N/A	10 8	40,000,0 00	10 8	45,000,0 00	10 8	46,000,0 00	10 8	131,000,0 00	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA	KECAMA TANMOJ OAGUNG		

Tabel 6.2

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mojoagung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET		
				2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Mojoagung	61,9	62	62,1
		2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. Mojoagung	73,5	74	74,5
			Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	62,00	63,45	65,00
		3. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	3. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojoagung	8,35	8,41	8,52

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD, maka Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang telah menetapkan indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, baik pencapaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator hasil yang termuat dalam program-program yang akan dilaksanakan. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Mojoagung dengan pemerintah, dan Kecamatan Mojoagung akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKJ tahunan.

**Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Mojoagung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojoagung	73	73.5	74	74.5	74.5	
2.	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)	8,3	8,35	8,41	8,52	8,52	

	Kecamatan Mojoagung					
4.	Nilai Paten Kecamatan Mojoagung	83.5	84	84.5	85	85
5.	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	N/A	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	N/A	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Mojoagung merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Jombang. Rencana Strategis Kecamatan Mojoagung Tahun 2024 - 2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojoagung serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi yang dimiliki (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mojoagung Tahun 2024 - 2026 menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mojoagung yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra ini. Keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun ke dalam Renstra ini memerlukan partisipasi. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya sebagai dokumen administrasi saja, namun secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Mojoagung, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Jombang, 27 Juni 2023

Camat Mojoagung

MUCHTAR, S.IP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19720621 199803 1 005

